

**ANALISIS POLA KONSUMSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI KOTAMADYA SAMARINDA**

**Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Nasional
Propinsi Kalimantan Timur**

Oleh :

M A W A N







NIM. 98310132

NIRM. 98.11.311.401301.01971

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
S A M A R I N D A
2002**


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : M A W A N
2. NIRM : 98. 11. 311. 401301. 01971
3. NIM : 98310132
4. Jurusan . Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
5. Jenjang Studi : Sarjana (S1)
6. Judul Skripsi :
7. Tanggal Pengujian Skripsi : Analisis Pola Konsumsi Pegawai Negeri Sipil
di Kotamadya Samarinda (Studi Kasus pada
Dinas Pendidikan Nasional Kalimantan Timur.
8. Dosen Pembimbing : 1. Drs. H. KASPUL , AM
2. AHMAD DIMIJATI , SE
9. Konsultasi :

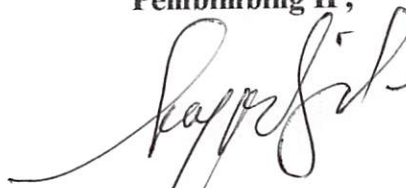
| Tanggal | Tanda Tangan / Paraf | | Keterangan |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | Pembimbing I | Pembimbing II | |
| |  |  | |
| |  |  | |
| |  |  | |
| | | | |
| | | | |

10. Tanggal selesai Menulis Skripsi :
11. Tanggal selesai bimbingan :
12. Telah Dievaluasi / Diuji dengan :
nilai

Pembimbing I ,


Drs. H. KASPUL , AM

Pembimbing II ,


AHMAD DIMIJATI , SE

HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS POLA KONSUMSI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KOTAMADYA
SAMARINDA (Studi Kasus Pada Kantor
Dinas Pendidikan Nasional Kalimantan
Timur)**

NAMA MAHASISWA : M A W A N

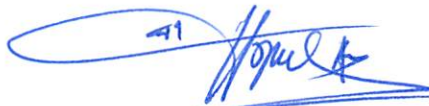
NIRM : 98. 11. 311. 401301. 01971

NIM : 98310132

JURUSAN : ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

Menyetujui,

PEMBIMBING I,



Drs. H. KASPUL, AM

PEMBIMBING II,



AHMAD DIMJATI, SE
NBM.337907

Mengetahui,

KETUA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH



RIWAYAT HIDUP

Mawan , lahir di Muara Kaman pada tanggal 18 bulan Februari tahun 1963, sebagai anak kelima dari sembilan bersaudara dari Ayah H. Fadil Anwar dan Ibu Janariah.

Pada tahun 1974 mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 002 di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan lulus pada tahun 1979. Setelah itu melanjutkan pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama PGRI 1 Muara Kaman dan lulus pada tahun 1982. Kemudian meneruskan pada Sekolah Menengah Ekonomi Atas Muhammadiyah 1 , dan lulus pada tahun 1986.

Kemudian pada tahun 1990 mulai bekerja pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Dan pada tahun 1998 juga meneruskan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT , atas berkah dan rahmat-Nya penulis , akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul :
“ANALISIS POLA KONSUMSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTAMADYA SAMARINDA (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kalimantan Timur)”.

Penyusunan ini bertujuan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda dalam rangka memperoleh gelar sarjana.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian pada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Kotamadya Samarinda.

Pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Arifin Idris, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda.
2. Bapak Drs. H. Kasful , AM sebagai Pembimbing I yang banyak membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
3. Bapak Ahmad Dimjati ,SE sebagai Pembimbing II yang banyak membantu dalam hal memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hingga penulis menyusun skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan beserta Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian .
6. Segenap keluarga yang telah memberikan dorongan moril dan materil demi terselesainya skripsi ini.

7. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah memberikan dorongan maupun saran dan kritik yang membangun serta sumbangan pemikiran.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu segala kritik dan saran membangun dari pembaca akan penulis terima senang hati.

Sebagai akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi penulis sendiri juga kepada semua pembaca.

Samarinda , April 2002

P e n u l i s ,

M A W A N

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. HALAMAN JUDUL | i |
| 2. BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI | ii |
| 3. HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| 4. RIWAYAT HIDUP | iv |
| 5. KATA PENGANTAR | v |
| 6. DAFTAR ISI | vii |
| 7. DAFTAR TABEL | ix |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 2 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 2 |
| D. Sistematika Penulisan | 3 |
| | |
| BAB II : DASAR TEORI | |
| A. Pengertian Pendapatan, dan Tabungan | 4 |
| 1. Pengertian Pendapatan | 4 |
| 2. Pengertian Tabungan | 13 |
| 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Orang Untuk menabung | 15 |
| 4. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga | 16 |
| B. Definisi Konsepsional | 21 |
| C. Hipotesis | 23 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| BAB III | : METODE PENDEKATAN | |
| | A. Defenisi Operasional | 24 |
| | B. Rincian Data Yang Diperlukan | 26 |
| | C. Jangkauan Penelitian | 26 |
| | D. Teknik Pengumpulan Data | 26 |
| | E. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis | 27 |
| | | |
| BAB IV | : HASIL PENELITIAN | |
| | A. Gambaran Pekerja di Samarinda | 29 |
| | B. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil | 32 |
| | C. Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil | 33 |
| | D. Penghasilan | 38 |
| | E. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil | 38 |
| | F. Keadaan Pendapatan Responden | 42 |
| | G. Keadaan Pengeluaran dan Tabungan Responden | 44 |
| | | |
| BAB V | : ANALISIS DAN PEMBAHASAN | |
| | Analisis dan Pembahasan | 48 |
| | | |
| BAB VI | : KESIMPULAN DAN SARAN | |
| | A. Kesimpulan | 52 |
| | B. Saran-saran | 53 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | x |

DAFTAR TABEL

- TABEL 1** : Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 1995 / 1996
- TABEL 2** : Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 1995 / 1996
- TABEL 3** : Pekerja Menurut Pekerjaan Tahun 1995 / 1996
- TABEL 4** : Pendapatan Responden Pegawai DIKNAS Tk.I Kaltim Golongan I
- TABEL 5** : Pendapatan Responden Pegawai DIKNAS Tk.I Kaltim Golongan II
- TABEL 6** : Pendapatan Responden Pegawai DIKNAS Tk.I Kaltim Golongan III
- TABEL 7** : Pendapatan Responden Pegawai DIKNAS Tk.I Kaltim Golongan IV
- TABEL 8** : Pengeluaran Responden Pegawai DIKNAS Tk.I Kaltim Golongan I
- TABEL 9** : Pengeluaran Responden Pegawai DIKNAS Tk.I Kaltim Golongan II
- TABEL 10** : Pengeluaran Responden Pegawai DIKNAS Tk.I Kaltim Golongan III
- TABEL 11** : Pengeluaran Responden Pegawai DIKNAS Tk.I Kaltim Golongan IV
- TABEL 12** : Rata - rata Pendapatan Respondent Setiap Golongan Kepegawaian
- TABEL 13** : Rata - rata Pengeluaran Respondent Setiap Golongan Kepegawaian
- TABEL 14** : Porsi Pengeluaran Pangan dan Non Pangan dan Tabungan Dari Keseluruhan Pengeluaran Responden Setiap Golongan Kepegawaian
- TABEL 15** : Hasrat Konsumsi Rata - rata Pegawai DIKNAS Tk. I Kaltim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kotamadya Samarinda, sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Timur, digambarkan sebagai kota yang pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Bila kerangka refrensinya wilayah Kalimantan yaitu sebesar 5,68 % pertahun, selain itu sebagai daerah yang subur dengan sumber daya alam, samarinda ini telah mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk Samarinda lainnya untuk mencari kehidupan yang lebih layak, sehingga dengan demikian konsekuensinya tertentu telah mewarnai dinamika kependudukan di kotamadya Samarinda ini dengan segenap implikasinya.

Salah satu yang paling terlihat transparan adalah masalah lapangan kerja, ketidak seimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia telah mengakibatkan adanya pengangguran yang cukup besar baik yang berasal kalangan terdidik maupun pengurangan tidak terdidik yang pada akhirnya keadaan ini akan membawa pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kelompok pekerja di lingkungan pemerintah, yang mempunyai bidang pekerjaan sebagai abdi masyarakat, untuk itu mereka dituntut untuk bekerja sesuai dengan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian Republik Indonesia, sementara itu kehidupan PNS yang mereka peroleh untuk membiayai kehidupan keluarga masih tidak seimbang dengan pengeluaran biaya hidup sehari-hari yang semakin inflatoir, lebih-lebih saat sekarang ini, saat dimana dengan krisis moneter telah melanda Indonesia yang ditandai dengan melambungny harga kebutuhan pokok dan semakin sulitnya lapangan kerja serta lumpuhnya sumber ekonomi tertentu telah menjadikan kelompok berpenghasilan tetap seperti PNS ini semakin sulit.

Dalam upaya untuk melihat permasalahan pendapatan dan pengeluaran PNS terutama yang berpenghasilan rendah , seperti yang dijelaskan oleh ahli, bahwa yang dimaksud golongan berpenghasilan rendah adalah golongan yang memperoleh pendapatan dan penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka jumlahnya jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya, golongan ini antara lain :

- a. Sebagian Pegawai Negeri Golongan I dan II
- b. Pembantu Rumah Tnagga
- c. Tuna Karya
- d. Sebagian Tuna Susila
- e. Petani Kecil di Pedesaan
- f. Kaum Nelayan buruh kecil
- g. Pekerja bidang jasa kecil ...¹)

Bagaimanakah golongan miskin ini memenuhi kebutuhan pokok mereka dan bagaimana struktur kebutuhan pokok mereka , masih menjadi tanda-tanda bagi kita ? Hal ini pulalah yang menjadi perhatian penulisan untuk mengadakan penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

“ Bagaimana pola pengeluaran / konsumsi Pegawai Negeri sipil di kantor Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat I Kalimantan Timur bagi setiap golongan Kepegawaian ”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui besarnya tingkat Pendapatan dan tingkat Pengeluaran Pegawai kantor DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur.
- b) Ingin mengetahui komposisi Pola Pengeluaran Pegawai kantor DIKNAS Tongkat I Kalimantan Timur.

1) Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers, ed, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Penerbit YIIS, CV. Raja wali Jakarta, 1982, halaman 81

- c) Ingin mengetahui besarnya hasrat menabung setiap tambahan pendapatan yang terjadi.
- d) Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada STIEM Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan pula penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan (input) bagi pihak yang memerlukannya

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dan penulisan skripsi ini dibagi keda dalam berbagai bab dan sub-sub yang terperinci sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan , mengungkapkan mengenai latar belakang, masalah yang dihadapi , tujuan dan kegunaan penulisan serta sistimatikanya.

Bab II. Dasar Teori, mengungkapkan teori konsumsi, pengertian pendapatan, pengeluaran, dan tabungan, hipotesis, definisi konsepsional.

Bab III. Metode Pendekatan , mengungkapkan definisi operasional, rincian data yang diperlukan, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, alat analisis dan pengujian hipotesis.

Bab IV. Hasil Penelitian, mengungkapkan tentang hasil penelitian.

Bab V. Meliputi Analisis dan Pembahasan.

Bab VI. Mengungkapkan tentang kesimpulan dan Saran.

BAB II

DASAR TEORI

A. Pengertian Pendapatan , Pengeluaran dan Tabungan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan pada dasarnya merupakan komponen utama dalam menentukan tingkat kesejahteraan, baik itu kesejahteraan masyarakat umum yang ditentukan oleh tingkat Pendapatan Nasional dan Tingkat kesejahteraan individu (perseorangan) yang ditentukan oleh tingkat pendapatan perkapita (income perkapita). Sedangkan sumber dari pendapatan itu sendiri dapat diperoleh dengan cara non produktif. Pendapatan yang diperoleh dengan cara non produktif dapat berupa hadiah, hibah atau pemberian secara cuma-cuma, warisan dan lain-lain. Jenis pendapatan ini sering disebut dengan transfer payment.

Namun biasanya kebanyakan pendapatan diperoleh dengan yang produktif seperti buruh, pegawai negeri, petani, ABRI, dan sebagainya. Pada garis besarnya Pendapatan Nasional dibedakan atas empat unsur yaitu : Upah dan gaji, sewa dan bunga. ²)

Selanjutnya Winardi mengemukakan tentang penyebab timbulnya pendapatan baik perseorangan maupun perusahaan :

Pendapatan adalah hasil berupa uang atau materil atau jasa-jasa manusia bebas perusahaan atau individu dalam produksi. ³)

2) Sudiyono R. , Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional , Liberty Yogyakarta, 1980, halaman 19.

3) Winardi, Kamus Ekonomi (Indonesia-Inggris), Alumni Bandung, 1977 , halaman 71.

Sedangkan pengertian produksi R. Djoerban Wachid berpendapat sebagai berikut :

Produksi adalah tiap-tiap perbuatan yang menjadikan barang dapat lebih sempurna memenuhi kebutuhan manusia. Dapat dikatakan dengan singkat tiap-tiap perbuatan yang menciptakan atau menambahkan nilai-nilai suatu barang⁴⁾

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa timbulnya suatu pendapatan karena adanya kegiatan-kegiatan produktif, karena itu pendapat-pendapat dapat melandasi perilaku kehidupan masyarakat , dalam kegiatan aktivitas setiap hari baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta yaitu melalui usaha produktif untuk mencapai hasil atau pendapatan yang maksimal.

Untuk lebih mempertegas pendapat tersebut diatas , maka Kaslan A Thohir mengelompokan atau menganalisa bahwa pendapatan seseorang atau individu lazim dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Pendapatan Asli

Pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung turut serta dalam produksi barang-barang benda. Jika demikian halnya, maka hanya pendapatan dari empat golongan penduduk yakni pemilik faktor produksi , tenaga (buruh), pemilik tanah , pemilik modal dan usahawan-usahawan adalah pendapatan asli sebab hanya golongan tersebutlah yang langsung turut serta dalam produksi barang-barang benda.

2. Pendapatan Turun

Pendapatan turunan atau pendapatan sekunder maksudnya adalah pendapatan dari golongan lainnya yang tidak langsung turut serta dalam produksi barang-barang, misalnya pendapatan yang diperoleh dengan pemberian jasa.⁵⁾

4) R. Djoerban Wachid, Pelajaran Ekonomi, PT. Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1976, Halaman 33

5) Kaslan A. Thohir, Ekonomi Selayang Pandang, Jilid II, Sumur Bandung , 1962 , halaman 229

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan itu sendiri berbagai macam cara yang digunakan , secara konsepsi Komaruddin mengemukakan pendapat tentang beberapa kebijaksanaan yang dapat memperbesar pendapatan dan produksi. Ada tiga faktor dominan riel yaitu :

1. Perubahan – perubahan dalam permintaan dari dalam dan luar daerah , daerah yang berkembang yang nyata memperbesar permintaan tenaga kerja yang berlebihan.
2. Perubahan dan perbaikan hubungan faktor-faktor ekonomi , dengan cara memperluas tanah dan menambah kapital yang relatif kurang atau mengurangi tenaga kerja yang berlebihan pada suatu daerah lain atau keduanya.
3. Perbaikan dan perubahan teknologi atau penemuan baru suatu dominan ekonomi dan perubahan sikap terhadap harapan-harapan masa depan⁶⁾

Dari ketiga pokok pengertian tersebut diatas , bertujuan untuk meningkatkan atau mencapai titik optimum dari produktivitas kerja. Hal ini juga didukung oleh konsep Pembangunan Ekonomi yaitu : bahwa perkembangan ekonomi masyarakat yang pesat adalah ditentukan oleh tingkat produktivitas kerja, tingkat investasi dan faktor-faktor produksi lainnya. Atau dapat dikatakan pendapatan perkapita akan meningkat jika prosentase pertumbuhan pembangunan ekonomi lebih besar dari pada prosentase tingkat pertumbuhan populasi (growth of population).

Pendapatan seseorang bisa saja berbeda dengan orang lainnya, karena hal ini tergantung pada jenis pekerjaan dan keuletan seseorang dalam usahanya mewujudkan segala bentuk pendapatan itu.

6) Komaruddin , Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Alumni Bandung , 1980, halaman 24

Sesuai dengan sumbernya, pada dasarnya pendapatan terdiri dari :

1. Pendapatan para pekerja, yaitu gaji dan upah.
2. Pendapatan dari usaha perseorangan.
3. Pendapatan dari sewa.
4. Pendapatan dari bunga.
5. Keuntungan perusahaan dan lain-lain.

Sedangkan tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh seseorang banyak tergantung dari :

1. Kecakapan dalam kegiatan kerja.
2. Keahlian dan keuletan berusaha.
3. Banyak sedikitnya modal yang digunakan.
4. Kekayaan yang dimiliki⁷⁾

Sebagian para ahli mengemukakan dua istilah dalam pendapatan, yaitu "Pendapatan pribadi dan pendapatan disposable"⁸⁾

Pendapatan disposable (pendapatan yang siap dibelanjakan) yang diterima oleh rumah tangga pada umumnya digunakan dua tujuan yaitu :

1. Untuk konsumsi.
2. Untuk disimpan sebagai tabungan.

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan pendapat Prof. DR. Sudiyono R, MBA. Yaitu :

$$Y = C + S$$

Dimana : Y = Pendapatan

C = Konsumsi

S = Tabungan⁹⁾

Sedangkan teori General yang dikemukakan oleh KEYNES disebutkan sebagai berikut :

7) Sigit Purnomo, dkk, Ekonomi Umum II, Depdikbud RI Jakarta, halaman 40
8) Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi, Bina Grafika, 1981, halaman 52
9) Sudiyono, Loc. Cit., halaman 259

Pendapatan yang kita terima sebagian untuk konsumsi dan sisanya untuk saving. Karena itu antara pendapatan (Y) Konsumsi (C) serta Tabungan (S) selali ada hubungan, kalau konsumsi merupakan fungsi daripada pendapatan dan ($C = F (Y)$), maka demikian halnya dengan tabungan juga merupakan fungsi dari pendapatan ($S = F (Y)$).¹⁰

Selanjutnya Deuseberrry mengemukakan pendapatnya :
“Keputusan-keputusan konsumsi dan tabungan sangat diperhatikan oleh lingkungan dimana seseorang hidup”.¹¹

Menurut Winardi, SE, bahwa pendapatan nasional terdiri dari beberapa konsep yaitu :

1. Gross National Product (GNP) atau, Produk Nasional Bruto.
2. Net National Product (NNP) atau, Produk Nasional Netto.
3. National Income (NI) atau, Pendapatan Nasional.
4. Personal Income (PI) atau, Pendapatan perseorangan.
5. Disposable Personal Income (YD) atau, Pendapatan Perseorangan Netto.¹²

Untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan atau jumlah dari pendapatan maka diperlukan suatu cara atau metode pendekatan. Didalam Ilmu Ekonomi Makro terdapat tiga metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional yaitu :

1. Pendekatan Produksi (Production Approach)
2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach).¹³

Keterangan :

10) Kaslan A, Thohir, *Op.Cit.* , halaman 7

11) Eugene A. Diulio, *Micro Ekonomi Theory*, Alih Bahasa oleh Farid Wijaya, Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta, 1977, halaman 90

12) Winardi , *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Tersito Bandung, 1989, halaman 90

13) Sudiyono, *Loc. Cit*, halaman 24

1. Pendekatan Produksi

Metode pendekatan produksi yaitu dengan cara menjumlahkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau perseorangan dalam waktu proses produksi yang tertentu, biasanya satu tahun. Menurut Gardner Ackly, dalam perhitungan pendapatan dengan metode pendekatan produksi, yaitu :

Kesukaran dalam menaksirkan pendapatan melalui produksi terletak pada dalam usaha menghindari adanya perhitungan ganda (Double Counting). Umpamanya yang menjadi bahan roti tersebut, gandum yang menjadi roti dan pupuk yang digunakan dalam proses tanaman gandum tidak boleh dihitung sebagai output. ¹⁴)

Dalam menghitung pendapatan melalui pendekatan produksi, sedapat mungkin dihindari adanya perhitungan ganda dari bahan-bahan yang digunakan dalam suatu kegiatan produksi atau kata lain dalam menaksir besarnya pendapatan adalah dilakukan dengan cara hanya menghitung nilai tambah dari bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi atas harga yang diterima produsen dengan biaya bahan baku penolong atau harga pembelian.

2. Pendekatan Pendapatan

Metode perhitungan dengan pendekatan pendapatan dengan cara menghitung seluruh penghasilan yang diperoleh pemilik faktor produksi sebagai proses produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Pengukuran pendapatan dengan metode ini dapat dilihat melalui hasil yang diperoleh dari penggunaan faktor produksi tersebut seperti :

1. Faktor produksi tenaga kerja(Man Power) memperoleh pendapatan berupa upah dan gaji.
2. Faktor Produksi Modal (Kapital) , memperoleh pendapatan berupa bunga.
3. Faktor produksi Alam (Nature) , memperoleh pendapatan berupa sewa tanah.

14) Gardner Ackly , Teori Ekonomi Makro, Universitas Indonesia, Jakarta, 1979, halaman 38

Selanjutnya pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi tersebut diatas , juga didalamnya terdapat pendapatan berupa :

1. Profit yang diperoleh pengusaha.
2. Penyusutan dari barang- barang modal
3. Pendapatan berupa pajak .

Berikut dikemukakan pendapat mengenai pendekatan pendapatan dengan menggunakan methode Income Aproach menurut Paul Samuelson sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pendapatan yang didekati dengan melalui Income Aproach adalah semua yang dibayar oleh perusahaan kepada masyarakat berupa upah, sewa dan keuntungan. ¹⁵)

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Paul Samuelson tersebut masih merupakan pendapatan kotor, hal ini disebabkan karena masih mencakup penyusutan barang-barang modal, maka untuk memperoleh nilai pendapatan bersih dilakukan dengan cara mengeluarkan unsur-unsur penyusutan dari peralatan produksi, pada akhirnya yang terdapat pendapatan adalah upah dan gaji, bunga, dan pajak yang dibayar kepada pemerintah.

Sedangkan pendapat Kadariah mengenai pendapatan itu sendiri terdiri atas :

Pendapatan berupa upah dan gaji, bunga, devident keuntungan merupakan suatu arus uang dalam suatu jangka waktu, umumnya seminggu, sebulan, setahun, atau dalam jangka waktu yang lebih lama . ¹⁶)

15)Paul Samuelson, Economic Pengantar Uraian I , Penerbit Viva Study Club, Jakarta, 1977, halaman 134

16)Kadariah, Analisa Pendapatan Nasional , Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1981, halaman 26.

Selanjutnya N. Sutjiono : “ Pendapatan adalah seluruh pendapatan yang diperoleh seseorang selama dalam jangka waktu tertentu yang berupa uang atau barang”¹⁷⁾

Demikian juga dalam teori pendapatan yang dikemukakan oleh Profesor J. Andriessen, dikatakan bahwa :

Bagaimana subyek ekonomi pendapatan dengan cara normal untuk memperoleh suatu pendapatan terdiri dari tindakan melakukan prestasi yang ekonomis, bernilai dengan perkataan lain, dengan jalan menyelenggarakan jasa-jasa atau memproduksi benda-benda untuk mana terdapat permintaan bertenaga beli. Jadi dengan demikian pendapatan merupakan kontra prestasi atau harga prestasi yang ekonomis mempunyai nilai.¹⁸⁾

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan itu ditentukan oleh prestasi dari subyek ekonomi dengan jalan kegiatan ekonomi, produksi barang dan jasa-jasa.

3. Pendekatan Pengeluaran

Metode ini menghitung pendapatan dengan jalan menghitung pengeluaran atau belanja dari seluruh lapisan masyarakat, pendapatan yang diterima masyarakat akan dibelanjakan pada berbagai barang-barang dan jasa-jasa tertentu.

Dengan cara ini pengeluaran dapat dimaksudkan kedalam kelompok sebagai berikut :

1. Pengeluaran konsumsi seseorang dan rumah tangga (personel Consumption Expeniture) yang terdiri dari pengeluaran untuk barang-barang tahan lama (durable goods), dan barang tidak tahan lama.
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah (Government Purchase of Goods and Service), yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Invesment Domestic Bruto (Gross Private Domestic Invesment), yang terdiri dari bangunan baru, alat produksi yang tahan lama, dan penyediaan barang-barang oleh perusahaan.
4. Ekspor dikurangi impor ($X - M$).

17)N. Sutjiono, Kamus Production and Marketing Management, Akademi Sekretaris Malang, 1973, halaman 134

18) Andriessen, Proses Ekonomi, saduran Drs. Winardi, CV. Tarsito Bandung, 1969, halaman 88

5. Dikurangi Investasi asing kalau ada. ¹⁹⁾

Untuk mengetahui berapa besarnya pendapatan yang diperoleh suatu negara melalui pendekatan produksi dapat dilakukan dengan cara :

1. Menentukan besarnya pengeluaran pemerintah baik biaya rutin maupun biaya pembangunan.
2. Menentukan besarnya investasi bersih pihak swasta, dapat dilihat melalui :
 - a. Penambahan pembangunan
 - b. Penambahan peralatan
 - c. Penambahan persediaan barang-barang.
3. Menentukan besarnya pengeluaran konsumsi yang berarti pembelian terhadap barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan para anggota masyarakat sektor swasta.

²⁰⁾

Selain itu tujuan pengukuran pendapatan adalah untuk mengetahui gambaran tentang keadaan sekarang maupun keadaan yang akan datang. Dengan demikian perkiraan pendapatan tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan pembangunan dan pengembangan suatu wilayah, dari perkiraan ini bukan saja dapat diketahui sebab-sebab dari kemakmuran atau kemiskinan akan tetapi juga dapat memberikan gambaran tentang struktur ekonomi suatu wilayah.

19) Ace Partadirejo, Perhitungan Pendapatan Nasional, PL3ES, 1997, halaman 44

20) Anonim, Hasil Perkiraan Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa, BKPMMD Depdagri Jakarta, 1972, halaman 1

2. Pengertian Tabungan

Pendapatan seseorang yang diperoleh dengan cara produktif maupun non produktif selain dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dipergunakan sebagai konsumsi, juga dipergunakan untuk menabung atau investasi. Tabungan atau investasi ini biasanya dilakukan bila terdapat kelebihan pendapatan setelah dipergunakan untuk konsumsi.

Untuk memperjelas uraian-uraian tersebut diatas, Teori General yang dikemukakan oleh J.M. Keynes :

$$Y = C + S$$

$$Y = C + I$$

$$\text{Jadi } C + S = C + I, \text{ atau } I = S \quad \dots\dots\dots 21)$$

Dimana :

Y = Pendapatan

C = Konsumsi

I = Investasi

S = Tabungan

Sedangkan Prof. Dr. Sumitro Djoyohadikusuma mengemukakan pengertian adalah sebagai kemampuan dan kesedian menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu supaya dimasa yang akan datang terbuka kemungkinan untuk konsumsi yang lebih memuaskan. ²²)

Jadi menurut pendapat tersebut bahwa konsep tabungan bukan merupakan konsep sisa, tetapi diungkapkan bahwa tabungan adalah kemampuan untuk menahan konsumsi agar dikemudian hari diperoleh konsumsi yang lebih memuaskan , walau pada tabungan memang sisa pendapatan setelah dikunsumsi ($S = Y - C$)

21) Kaslan A. Thohir, Op.Cit. halaman 25

22) Sumitro Djoyohadikusumo, Ekonomi Pembangunan, PT. Pembangunan Jakarta, 1985, halaman 16

Pendapatan merupakan faktor yang dominan bagi semua orang untuk memperbesar konsumsi atau memperbesar tabungan. Kecenderungan masyarakat dalam konsumsi terbagi atas tiga hal yang sering disebut dengan tiga corak konsumsi masyarakat yaitu :

1. Jika pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat, namun kenaikan tidak sebesar kenaikan pendapatan.
2. Setiap kenaikan pendapatan akan dibagi untuk konsumsi dan tabungan.
3. Kenaikan pendapatan jarang menyebabkan penurunan konsumsi dan tabungan. ²³⁾

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan faktor utama dalam menentukan tinggi rendahnya tabungan. Jika pendapatan seseorang bertambah maka kecenderungan untuk menabung juga semakin besar, demikian juga halnya dengan konsumsi jika pendapatan bertambah konsumsi juga semakin meningkat.

Dari kedua uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

$$MPS + MPC = 1$$

$$MPS = 1 - MPC$$

Pembuktian dari rumus tersebut adalah :

$$Y = C + S$$

$$Y = C + S$$

$$Y = C + S$$

$$\frac{\quad}{Y} = \frac{\quad}{Y}$$

$$1 = \frac{\quad}{Y}$$

$$1 = MPC + MPS \dots\dots\dots^{24)}$$

Keterangan :

- a. MPC (Marginal Propensity to Consume) adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dan perubahan pendapatan yang menyebabkan perubahan konsumsi tersebut.

23) Kaslan A. Thohir, Op.Cit, halaman 254
 24) Sudiyono, Loc.Cit, halaman 60

- b. MPS (Marginal Propensity to Saving) adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan tabungan dan perubahan pendapatan yang menyebabkan tabungan tersebut.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Orang Untuk Menabung

Dalam melakukan segala aktivitas kehidupan untuk memenuhi segala kebutuhan , baik untuk keperluan masa sekarang maupun untuk persiapan masa yang akan datang, bahwa seseorang harus mempunyai simpanan atau persiapan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan , salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menabung.

Sedangkan latar belakang untuk menabung setiap individu mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Berbagai motivasi tersebut biasa disebut dengan faktor pendorong untuk menabung.

Pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan seseorang mampu menabung atau tidak. Karena adanya pendapatan yang lebih setelah dikonsumsi orang baru bisa menabung.

Banyak dari sebagian masyarakat kita mereka mau menabung di bank karena harapan mendapat keuntungan, sedangkan keuntungan penghasilan tersebut biasa diterima dengan bunga.

Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita alami diluar rencana dan kemampuan kita, maka dengan menabung seseorang akan mempunyai simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dibutuhkan jadi latar belakang masyarakat menabung adalah untuk berjaga-jaga.

Yang mendorong seseorang untuk menyimpan sebagian dari kekayaan dalam bentuk uang tunai ialah motif berjaga - jaga (precautionary motive).

28)

Dalam masa-masa sekarang ini masyarakat tidak hanya tertarik dengan hal-hal yang ditawarkan oleh lembaga perbankan tapi sudah mampu menilai dengan kepuasan . Kepuasan tersebut salah satunya pelayanan yang baik dapat menarik nasabah.

28) Sudiyono R., Ekonomi Makro Analisa-LM dan Permintaan dan Penawaran Agregat, Liberty Yogyakarta, halaman 23

Dalam situasi seperti ini, bank dituntut untuk melakukan berbagai upaya untuk menarik minat masyarakat menyimpan dananya di bank dalam kondisi likuidasi yang tetap dan persaingan antar bank yang cukup tajam dikalangan perbankan menerapkan strategi yang lebih untuk meningkatkan perolehan dana dari pihak ketiga (funding), meningkatkan kualitas pelayanan .²⁹⁾

4. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga

Menurut Engel ada suatu hubungan antara konsumsi rumah tangga untuk suatu barang atau golongan barang dengan penghasilan rumah tangga. Dia menemukan bahwa proporsi dari penghasilan yang dikeluarkan untuk membeli makanan berkurang dengan naiknya penghasilan . Tetapi jelas bahwa tingkat pendapatan rumah tangga bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi konsumsi .Tingkat konsumsi untuk suatu barang dari suatu rumah tangga juga dipengaruhi oleh jumlah anggota-anggota keluarga, komposisi umur, jenis kelamin, letak geografis, asal usul dan agama dari anggota-anggotanya, jumlah aktiva lancar yang dipegang dan harta dari barang-barang konsumsi (Y) dari barang-barang ke- i untuk rumah tangga ke- r dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{ir} = f_i (x_r : P_1 \dots P_n, T_{1r} \dots T_{kr} : U_{ir})$$

Dimana x_r adalah penghasilan rumah tangga ke- r , $P_1 \dots P_n$ adalah harga-harga dari n barang, $T_{1r} \dots T_{kr}$ adalah nilai dari faktor-faktor selera dan keinginan, $T_1 \dots T_k$ untuk rumah tangga ke- r , dan U_{ir} adalah unsur kesalahan statistik (error term) ; f_i tidak tergantung pada r . Faktor-faktor selera dan referensi dapat dianggap ditentukan oleh jumlah dan distribusi umur dan jenis kelamin, letak geografis, asal usul dan agama serta karakteristik-karakteristik dari lain rumah tangga ke- r . Dalam analisa empiris fungsi Engel, tidaklah mungkin untuk memperhitungkan semua faktor ini.

Oleh karena itu analisa semacam ini biasanya dibatasi pada faktor-faktor yang diperkirakan mempunyai pengaruh penting, misalnya pendapatan. Hal ini disebabkan bahwa meskipun banyak sekali faktor-faktor lain tetapi pengaruhnya secara individu tidak penting dan banyak dari faktor-faktor tersebut yang bersifat kualitatif dan sukar diukur secara kuantitatif.

29) Syamsi Pohan, Vice President Bank IFI. Buletin Ekonomi, Bapindo No. 02 Tahun XXI Edisi Maret/April, 1996, halaman 16

Pengertian pendapatan dan penerimaan menurut Biro Pusat Statistik dibedakan menjadi :

1. Pendapatan faktor yang distribusikan
2. Transfer yang bersifat redistributif .

Pendapatan faktor golongan pertama dapat dibagi lagi menurut sumbernya menjadi ; (01) penghasilan sebagai gaji dan upah, (02) penghasilan dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas (03) penghasilan dari pemilikan harta. Golongan kedua transfer redistributif, terutama terdiri atas transfer pendapatan yang tidak bersifat mengikat dan biasanya bukan merupakan imbalan atas jasa penyerahan barang atau jasa atau harta milik.

Untuk mempermudah pengumpulan data, maka pendapatan dan penerimaan anggota-anggota keluarga dibagi dalam : (1) pendapatan berupa uang, (2) pendapatan berupa barang dan, (3) lain-lain penerimaan uang dan barang.

Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi. Sumber-sumber yang utama adalah gaji dan upah serta lain-lain balas jasa serupa dari majikan ; pendapatan bersih dari hasil usaha sendiri dan pekerjaan bebas ; pendapatan dari penjualan barang yang dipelihara di halaman rumah, hasil investasi seperti bunga modal, tanah, uang pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial .

Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Barang-barang dan jasa-jasa yang diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalian tidak diimbangi atau disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang dan jasa tersebut;

demikian pula penerimaan barang secara cuma-cuma, pembelian barang dan jasa dengan harga subsidi atau reduksi dari majikan merupakan pendapatan berupa barang. Untuk lain-lain penerimaan uang dan barang yang dipakai sebagai pedoman adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributif dan biasanya membawa perubahan dalam keuangan rumah tangga, misalnya hasil undian, warisan, penagihan piutang, kiriman uang, menang judi.

Biro Pusat Statistik memerinci pendapatan dan pengeluaran dalam kategori sebagai berikut :

1. Pendapatan berupa uang, yaitu pendapatan

(1) dari gaji dan upah yang diperoleh dari :

- a. Kerja pokok.
- b. Kerja sampingan
- c. Kerja lembur, dan
- d. Kerja kadang-kadang.

(2) dari usaha sendiri, yang meliputi ;

- a. hasil bersih dari usaha sendiri.
- b. Komisi .
- c. Penjualan dari kerajinan tangan .

(3) dari hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah, dan

(4) dari keuntungan sosial yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.

2. Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan berupa

(1). Bagian pembayaran upah dan gaji yang berbentuk dalam :

- a. Beras
- b. Pengobatan
- c. Transportasi
- d. Perumahan
- e. Rekreasi

- (2). Barang yang diproduksi dan dikonsumsi dirumah, antara lain :
 - a. Pemakaian barang yang diproduksi di rumah
 - b. Sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.
3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang berupa :
 - a. Pengambilan tabungan
 - b. Penjualan barang-barang yang dipakai
 - c. Penagihan piutang
 - d. Pinjaman uang
 - e. Kiriman uang
 - f. Hadiah / pemberian
 - g. Warisan
 - h. Menang judi
4. Pengeluaran Makanan
5. Pengeluaran Perumahan
6. Pengeluaran Pakaian
7. Pengeluaran barang-barang dan jasa
8. Pengeluaran non konsumsi yang meliputi ;
 - (1) Pengeluaran untuk usaha dan
 - (2) Pengeluaran non konsumsi dan lain-lain pembayaran

Perincian pendapatan menurut Biro Pusat Statistik tersebut pada dasarnya bisa juga dikelompokkan dalam pendapatan sektor formal, informal, subsisten dan penerimaan yang bukan merupakan pendapatan.

Pendapatan sektor formal , yakni segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor formal. Pendapatan ini meliputi :

1. Pendapatan berupa uang dari gaji
 - a. Gaji dan upah
 - b. Hasil investasi
2. Pendapatan berupa barang antara lain meliputi ;
 - a. Beras
 - b. Pengobatan
 - c. Transportasi
 - d. Perumahan, dan
 - e. Rekreasi.

Pendapatan sektor informal, yakni segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor formal. Pendapatan ini berupa :

1. Pendapatan dari usaha yang meliputi ;
 - a. Hasil bersih dari usaha sendiri
 - b. Komisi
 - c. Penjualan dari Kerajinan Tangan
2. Pendapatan dari Investasi, dan
3. Pendapatan dari keuntungan sosial

Pendapatan sektor subsisten terjadi apabila produksi dengan konsumsi terletak di satu tangan atau disatu masyarakat kecil. Apa yang diproduksi sendiri dikonsumsi sendiri dan apa yang dikonsumsi sendiri diproduksi sendiri. Tentu saja perkataan sendiri ini tidak mutlak untuk satu orang, mungkin satu keluarga (besar atau kecil), satu masyarakat kecil atau sekelompok orang-orang

B. Definisi Konsepsional

Agar dalam melakukan penelitian ini diperoleh data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian maka, diperlukan batasan-batasan dari pada variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan adalah merupakan salah satu faktor yang utama dalam menentukan konsumsi dan tabungan .³⁰⁾

Menurut Gardner Akcley bahwa :

Pendapatan adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa produksi suatu waktu tertentu atau diperolehnya dari harta kekayaan.³¹⁾

Menurut Kadariah bahwa :

Pendapatan terdiri dari penghasilan berupa / gaji, bunga, devident, keuntungan, dan merupakan dalam suatu jangka waktu, umpamanya seminggu, sebulan, setahun, atau suatu jangka waktu yang lebih lama.³²⁾

Menurut Sumitro Djoyohadikusuma bahwa :

Pendapatan merupakan pembayaran balas jasa untuk masing-masing faktor produksi dalam proses, bunga, modal, keuntungan untuk pengusaha pemegang resiko, upah dan gaji untuk tenaga kerja dan sewa tanah untuk pemilik tanah.³³⁾

Menurut P.A. Samuelson dan Williem D. Nordhaus bahwa :

Pendapatan adalah arus upah, bunga, deviden , dan penerimaan lainnya yang menjadi hak seseorang atau suatu bangsa.³⁴⁾

30) P.A. Samuelson, Economic An Introdictory Analisis Balai Lektor Mahasiswa, 1978, halaman 70

31) Gardner Akcley, Loc.Cit, halaman 36

32) Kadariah, Op.Cit , halaman 32

33) Sumitro Djoyohadikusumam Op.Cit, halaman 29

Menurut N.Sutjiono bahwa:

Pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima seseorang selama jangka waktu tertentu berupa uang atau barang. ³⁵⁾

Prof. J. Andriessen, mengatakan bahwa :

Pendapatan adalah bagaimana subyek ekonomi mencapai pendapatan dengan cara normal untuk memperoleh suatu pendapatan terdiri dari tindakan melakukan prestasi ekonomis bernilai dengan perkataan lain dengan jalan menyelenggarakan jasa-jasaa atau memproduksi benda-benda yang memuaskan, terdapat permintaan bertenaga beli, jadi dengan demikian pendapatan merupakan kontra prestasi atau harga prestasi yang mempunyai nilai ekonomis ³⁶⁾

2. Tabungan

Menurut Kaslan A. Thohir bahwa :

Tabungan adalah sebenarnya tidak lain dari pada sisa penghasilan yang tidak dipergunakan atau tidak dikonsumsi. Karena itu maka tabungan itu tergantung pula dari penghasilan atau dengan kata lain tabungan adalah suatu fungsi dari pendapatan. ³⁷⁾

Sedangkan menurut Sumitro mengemukakan pengertian dari tabungan yaitu :

Tabungan adalah sebagai kemampuan dan kesediaan untuk menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu supaya dimasa yang akan datang terbuka kemungkinan konsumsi yang lebih memungkinkan. ³⁸⁾

Menurut P.A. Samuelson dan Willem D. Nordhous adalah sebagai berikut : “ Tabungan adalah selisih antara pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable Income) dengan belanja untuk konsumsi”.³⁹⁾

35) N. Sutjiono, Op. Cit, halaman 134

36) Andriessen , Op.Cit, halaman 88

37) Kaslan A. Thohir, Op. Cit , halaman 107

38) Sumitro Djyohadikusuma, Op.Cit, halaman 85

39) P.A. Samuelson dan Williem D. Nordhous, Op.Cit, halaman 535.

C. Hipotesis

Dengan bertitik tolak pada latar belakang dan masalah mana dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut :

“ Diduga bahwa terjadi perbedaan pola pengeluaran atau pkonsumsi bagi setiap golongan, dimana untuk golongan I dan II cenderung lebih besar untuk kebutuhan pokok / primer sedangkan untuk golongan III dan IV cenderung lebih kecil ”

BAB III

METODE PENDEKATAN

A. Definisi Operasional

Dalam penulisan ini dikemukakan batasan atau yang berkaitan secara langsung pada variabel-variabel yang akan diteliti dan akan lebih bersifat operasional, maka perlu dijelaskan faktor-faktor yang merupakan sasaran dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Pola pengeluaran adalah arah dan tujuan dari semua bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu periode waktu tertentu, baik pengeluaran untuk konsumsi , pembayaran angsuran kredit ditabung maupun yang akan ditransfer.
2. Pola konsumsi diartikan sebagai komposisi pengeluaran , baik pengeluaran untuk pangan maupun pengeluaran non pangan yang dilakukan oleh seorang pegawai pada kantor DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur.
3. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumsi di sini adalah segala pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan, yang dilakukan oleh setia anggota pegawai negeri sipil , baik di dalam maupun di luar rumah tangga , baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan rumah tangga.
4. Maupun pengeluaran yang dimaksud itu seluruh pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan (*non makanan*) yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga di dalam lingkungan ataupun di luar lingkungan rumah tangga.

Dalam hal ini pengeluaran konsumsi meliputi :

- 1) Pengeluaran untuk papan]
 - a. Beras
 - b. Lauk pauk

- c. Bumbu Masak
- d. Gula
- e. Teh
- f. Susu
- g. Kopi
- h. Sayuran
- i. Minyak
- j. Minuman

2) Pengeluaran untuk non pangan

- a. Pengeluaran perumahan
- b. Pengeluaran untuk sandang
- c. Pengeluaran kesehatan dan jasa
- d. Pengeluaran pendidikan
- e. Pengeluaran transportasi
- f. Pengeluaran hiburan
- g. Pengeluaran sosial dan masyarakat
- h. Pengeluaran gaji dan retribusi

5. Kemudian yang dimaksud dengan hasrat konsumsi adalah dorongan atau keinginan seseorang dalam melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dari setiap adanya tambahan pendapatan .
6. Yang dimaksud dengan pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diterima seorang pegawai pada kantor DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dimana perhitungannya akan menggunakan metode-metode penerimaan

B. Rincian Data Yang Diperlukan

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan yang diterima setiap bulannya seperti :
Upah, gaji, honor, usaha rumah tangga atau persewaan, bunga, modal ,
kiriman, tabungan serta penjualan barang selama periode tertentu.
2. Pengeluaran setiap bulannya seperti konsumsi makanan dan bukan
makanan , memberikan sumbangan dan pengeluaran tabungan serta
pengeluaran lainnya seperti pembayaran kredit dan lain-lain selama
periode tertentu.
3. Tabungan setiap bulan untuk semua golongan kepegawaian.
4. Data-data lain yang menunjang penelitian ini.

C. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur, responden terpilih sebanyak 26 orang, dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------------------|--------------------|
| - Golongan I / b sampai I / d sebanyak | = 6 orang |
| - Golongan II / a sampai II / d sebanyak | = 8 orang |
| - Golongan III / a sampai III / d sebanyak | = 8 orang |
| - Golongan IV / a sampai IV / b sebanyak | = <u>4 orang</u> + |
| Jumlah Total Responden | = 26 orang |

Metode yang dipergunakan adalah Stratified Random Sampling, hal ini dilakukan mengingat populasi bersifat strata.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (Field Work Research)

Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke obyek yang bersangkutan dengan sistem observasi yang mengadakan pengamatan langsung dan mencatat data yang penulis perlukan sehubungan dengan penelitian ini dengan memberikan daftar pertanyaan kepada rumah tangga yang dipilih sebagai sample.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan dengan penelitian melalui berbagai literatur, laporan, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

E. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisa lebih lanjut dari hasil penelitian , serta dengan mempermudah dalam pembahasan selanjutnya maka diperlukan metode analisis.

Dalam pembahasan berikut ini dipergunakan alat analisis yang dapat menghitung hasta konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yang telah dirumuskan dalam dasar teori sebagai berikut :

$$PC (PTC) = \frac{C}{Y} \quad \dots\dots\dots 40)$$

Dimana :

PC (PTC) = Hasrat Konsumsi

C = Besarnya pengeluaran untuk konsumsi per bulan

Y = Besarnya pendapatan per bulan

Dengan anggapan bahwa :

- a. Apabila PC (PTC) lebih kecil dari satu (1) , maka berarti sebagian pendapatan dipergunakan untuk konsumsi dan sebagian untuk ditabung.
- b. Apabila PC (PTC) sama satu (1) , maka berarti bahwa pendapatan seluruhnya harus dikonsumsi sehingga tidak ada sisanya.
- c. Apabila PC (PTC) lebih besar dari satu (1) , maka berarti pola konsumsi lebih besar dari pendapatan yang ada dengan sumber dana lain

Dari hasil perhitungan tersebut nantinya akan terlihat apakah pola konsumsi nantinya tersebut lebih kecil dari 1 (satu) atau sama dengan 1 (satu) atau bahkan lebih besar dari 1 (satu).

40) Ari Sudarman dan Algifari, Ekonomi Mikro Makro , BPFE, Yogyakarta , 1992 , halaman 239

Sedangkan untuk hasrat tabungan rata-rata (*APS*) yaitu dengan menggunakan rumus :

$$APS = \frac{S}{Y} \dots\dots\dots^{41)}$$

Dimana :

APS = Average Propensity to Saving (rata-rata tabungan)

S = Jumlah saving (tabungan)

Y = Jumlah pendapatan

41) Loc. Cit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pekerja di Samarinda

Pegawai Negeri Sipil, adalah bagian dari ketenaga kerjaan di Samarinda dan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari keadaan dari keadaan penduduk secara umum, dimana menurut sensus penduduk tahun 1990 penduduk Samarinda mencapai 407.399 jiwa, terjadi pertumbuhan penduduk 5,68 % pertahun. Berdasarkan pertumbuhan penduduk periode 1980-1990 sebesar 5,68 %, maka pada tahun terakhir Pelita VI atau tahun 1998 akan meningkat menjadi 552,7 ribu jiwa.

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut secara proporsional akan menaikkan pula jumlah angkatan kerja di Samarinda. Sebagian dari angkatan kerja tersebut tidak mudah memperoleh pekerjaan karena kesempatan kerja terbatas, sebagian lagi sudah bekerja meskipun ada pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan ataupun amat rendah pendapatannya.

Berdasarkan hasil Susenas 1995-1996, banyaknya penduduk yang bekerja mencapai 191.664 orang atau 49,62 % dari seluruh angkatan kerja sebanyak 207.794 orang, sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 16.150 orang adalah penduduk yang mencari pekerjaan.

Dengan demikian tingkat pengangguran terbuka, tercatat 7,77 % tingkat pengangguran di Kotamadya Samarinda ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kalimantan Timur sebesar 5,58 %.

Sektor perdagangan ternyata masih merupakan usaha terbesar menyerap tenaga kerja yaitu sekitar 28,74 % dari total pekerja, disusul oleh sektor jasa-jasa sebesar 24,52 % dan Industri 19,17 %, sementara itu kalau dilihat dari jenis pekerjaannya, tenaga usaha penjualan juga terbanyak yaitu sebesar 27,02 %, sedangkan dari status pekerjaannya sebagai buruh / karyawan.

Keadaan tersebut di atas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1 : Penduduk usia 10 tahun keatas menurut kegiatan utama tahun
1995 – 1996

| Jenis Kegiatan Utama | Samarinda | | Kalimantan Timur | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | Banyaknya | Presentase | Banyaknya | Presentase |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Angkatan Kerja | | | | |
| a. Bekerja | 191644 | 49,62 | 879963 | 53,05 |
| b. Mencari Pekerjaan | 16150 | 4,18 | 52032 | 3,14 |
| Jumlah | 207794 | 53,18 | 931995 | 56,19 |
| Bukan Angkatan Kerja | | | | |
| a. Sekolah | 96464 | 24,98 | 363612 | 21,92 |
| b. Mengurus RT | 60852 | 15,75 | 266410 | 16,06 |
| c. Lainnya | 21144 | 5,47 | 96,752 | 5,83 |
| Jumlah | 178460 | 100,00 | 726783 | 100,00 |
| Jumlah | 386254 | 100,00 | 1658778 | 100,00 |

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya samrinda

Sedangkan penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja menurut pekerjaan utama tahun 1995-1996 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan tahun 1995-1996

| Jenis Kegiatan Utama | Samarinda | | Kalimantan Timur | |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | Banyaknya | Presentase | Banyaknya | Presentase |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pertanian | 24680 | 12,88 | 331322 | 37,65 |
| Pertambangan dan Penggalian | 3260 | 1,71 | 29508 | 3,35 |
| Industri | 36746 | 19,17 | 87669 | 9,96 |
| Listrik, Gas dan Air | 2520 | 1,31 | 6091 | 0,63 |
| Bangunan/ Kontruksi | 9678 | 5,05 | 58360 | 6,63 |
| Perdagangan | 55080 | 28,74 | 160054 | 18,19 |
| Angkatan dan Komunikasi | 10228 | 5,37 | 40341 | 4,58 |
| Keuangan | 2386 | 1,25 | 6314 | 0,72 |
| Jasa-jasa | 46986 | 24,52 | 160304 | 18,23 |
| Jumlah | 191644 | 100,00 | 879963 | 100,00 |

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya samrinda

Dari tabel tersebut terlihat bahwa di Samarinda sektor perdagangan, jasa-jasa, industri di pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Sedangkan apabila dilihat dari jenis pekerjaan utama maka terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 : Pekerja menurut pekerjaan tahun 1995-1996

Tabel 2 : Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan tahun 1995-1996

| Jenis Kegiatan Utama | Samarinda | | Kalimantan Timur | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | Banyaknya | Presentase | Banyaknya | Presentase |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tenaga Profesional | 10080 | 1,23 | 46330 | 5,26 |
| Tenaga Kepemimpinan Dan ketelitian | 2356 | 5,26 | 5833 | 0,66 |
| Pejabat Pelaksana dan Tata usaha | 27736 | 14,47 | 67281 | 7,65 |
| Tenaga Penjualan | 51874 | 27,07 | 154583 | 17,57 |
| Tenaga usaha jasa | 9052 | 4,72 | 40476 | 4,60 |
| Tenaga usaha tanian | 26664 | 13,91 | 327341 | 37,20 |
| Tenaga Produksi | 2386 | 1,25 | 6314 | 0,72 |
| Tenaga Operator | 6814 | 2,87 | 32027 | 3,64 |
| Tenaga Kasar | 25408 | 13,94 | 124450 | 14,14 |
| Jumlah | 191644 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya samrinda

Dari tabel 3 tersebut, tenaga penjualan, tenaga produksi, pejabat pelaksana di tata usaha, menempati jumlah pekerja yang besar baik untuk wilayah Samarinda maupun Kalimantan Timur.

Dari keseluruhan tabel-tabel tersebut, maka secara khusus dapat diklasifikasikan adanya pekerja di sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Samarinda.

B. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah . Menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembanguna.
2. Rumusan kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut diatas bertolak dari pokok pikiran , bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan perkataan lain , pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil.
4. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian , bahwa Pegawai Negeri Sipil berada sepenuhnya dibawah pimpinan pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.
5. Dari uraian tersebut diatas, maka timbullah kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil.

C. Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil

1. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang – Undang nomor 8 tahun 1974 ditentukan sebagai berikut :

a. Menurut Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disetiaai atau ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara, dan kepada Pemerintah.

Pada umumnya kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, dan Politik Pemerintah.

b. Menurut pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh pemerintah, berhubung dengan itu Pegawai Negeri Sipil berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, pada umumnya kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berhubungan dengan itu, maka setiap pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

- c. Menurut Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri sipil wajib menyimpan rahasia jabatan.

Pada umumnya yang dimaksud dengan "Rahasia" adalah rencana, kegiatan atau tindakan yang akan datang, sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungan dengan jabatan. Pada umumnya rahasia jabatan dapat berupa dokumen tertulis, seperti; surat, notulen rapat, peta, dan lain-lain, dapat berupa rekaman suara dan dapat pula berupa perintah atau keputusan lisan dari seorang atasan. Ditinjau dari sudut pentingnya, maka rahasia jabatan itu ditentukan tingkatan klasifikasinya, seperti sangat rahasia, rahasia, konfidensial atau terbatas. Ditinjau dari sudut sifatnya, maka ada rahasia jabatan yang sifatnya kerahasiannya terbatas pada waktu tertentu tetapi adapula rahasia jabatan yang sifat kerahasiannya terus-menerus.

Apakah sesuatu rencana, kegiatan atau tindakan bersifat rahasia jabatan, begitu pula tingkatan klasifikasi dan sampai bilamana hal itu menjadi rahasia jabatan, harus ditentukan dengan tegas oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Pada umumnya Pegawai Negeri Sipil karena jabatan atau pekerjaannya. Bocornya sesuatu rahasia jabatan selalu menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap negara.

Pada umumnya kebocoran sesuatu rahasia jabatan adalah disebabkan oleh dua hal, yaitu sengaja dibocorkan kepada orang lain atau karena kelalaian atau tidak / kurang hati-hatinya pejabat yang bersangkutan.

Apakah kebocoran rahasia jabatan itu karena kesengajaan atau karena kelalaian, akibatnya terhadap negara sama saja, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

Pegawai Negeri Sipil hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas pejabat yang berwajib kuasa Undang-Undang . umpamanya atas perintah petugas penyidik dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

2. Disamping kewajiban-kewajiban tersebut diatas, ditentukan juga hak-hak pegawai Negeri Sipil yaitu :

a. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya harus hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Gaji adalah sebesar balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.

Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem yaitu ; apa yang disebut sistem skala tunggal dan sistem skala ganda.

Yang dimaksud dengan sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

Yang dimaksud dengan sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada tingkat, tetapi juga di dasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan , prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Selain daripada kedua sistem penggajian yang dimaksud di atas, dikenal pula sistem penggajian ketiga, yang biasa disebut skala gabungan , merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem ganda.

Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat, mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga secara terus-menerus . Sistem skala ganda dan sisitem skala gabungan hanya mungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah ada analisa, klasifikasi, dan evaluasi jabatan / pekerjaan yang lengkap.

Dalam menentukan besarnya gaji harus memperhatikan kemampuan keuangan negara. Selain daripada itu, haruslah pula diperhatikan keadaan tempat dimana Pegawai Negeri Sipil itu dipekerjakan.

- b. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti. Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur pemberian cuti.

Cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti diluar tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama seperti menunaikan ibadah haji.

- c. Menurut pasal 9 Undang-Undang Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.

Dalam menjalankan tugas kewajiban selalu ada kemungkinan bahwa Pegawai Negeri menghadapi resiko.

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka ia berhak memperoleh perawatan dan segala biaya perawatan itu ditanggung oleh negara.

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.

Pegawai Negeri Sipil yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan ia menderita cacat jasmani dan rohani yang mengakibatkan ia tidak bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berdasarkan keterangan dari Team Penguji Kesehatan, maka disamping pesiun yang berhak diterimanya, kepadanya diberikan tunjangan cacat yang memungkinkan dapat hidup dengan layak.

Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

Yang dimaksud dengan tewas ialah :

- (1) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya ;
- (2) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya ;
- (3) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan luka atau cacat jasmani atau rohani yang didapat dan karena menjalankan tugas kewajibannya ;

(4) Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Kepada isteri / suami dan atau anak Pegawai Negeri yang tewas diberikan uang duka yang diterimanya sekaligus. Pemberian uang duka yang diterimanya sekaligus. Pemberian uang duka yang dimaksud tidak mengurangi pensiun dan hak-hak lainnya yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penghasilan

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil berhak atas gaji berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.
- b. Pada saat pengangkatan seorang calon Pegawai Negeri Sipil adakalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976.
- c. Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok calon Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah :
 - (1) Masa selama menjadi Pegawai Negeri baik Pegawai Negeri Sipil maupun anggota ABRI, kecuali masa selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
 - (2) Masa selama menjadi Pejabat Negara

E. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

1. Iuran Pegawai Negeri Sipil

- a. Untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran sebesar 10 % (sepuluh) persen dari penghasilan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 4 $\frac{3}{4}$ % (empat tiga perempat) persen untuk iuran dana pensiun.
 2. 2 % (dua) persen untuk iuran pemeliharaan kesehatan.

3. $3 \frac{1}{4}$ (tiga seperempat) persen untuk iuran tabungan hari tua.
- b. Ketentuan mengenai iuran tersebut di atur dalam Keppres Nomor 56 Tahun 1974 dan diubah dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1977.

2. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

- a. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang dimaksud dengan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk dana pensiun dan tabungan hari tua.
- b. Peserta Asuransi Sosial adalah semua Pegawai Negeri Sipil terkecuali PNS dilingkungan Departemen HANKAM.
- c. Saat menjadi peserta Asuransi Sosial ditentukan sebagai berikut :
 1. Dimulai pada tanggal pengangkatannya sebagai calon Pegawai Negeri sipil .
 2. PNS yang pengangkatannya menjadi calon PNS sebelum tanggal 30 Juli 1980 dianggap sudah menjadi peserta Asuransi sosial
- d. Hak peserta terdiri atas :
 1. Pensiun.
 2. Tabungan hari tua.
- e. Yang berhak mendapat pensiun adalah :
 1. Peserta ; atau
 2. Janda / duda dari peserta, dan janda / duda dari penerima pensiun ;
atau
 3. Yaitim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun.
 4. Orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda /
duda / anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.

- f. Yang berhak mendapat tabungan hari tua adalah :
1. Peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun ;
 2. Isteri / suami, anak atau waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.
- g. Hak atas tabungan hari tua hanya bersifat satu kali dan diberikan pada saat peserta berhenti sebagai PNS karena pensiun, meninggal dunia, atau berhenti tanpa hak pensiun.
- h. Hak atas asuransi kematian dibayarkan dalam hal peserta / keluarga meninggal dunia baik pada masa peserta masih bekerja aktif maupun setelah pensiun.
- i. Kedudukan sebagai peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal peserta :
1. Meninggal dunia ,
 2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan –alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Ketentuan-ketentuan mengenai Asuransi Sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981.

3. Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun

- a. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1984 diatur mengenai pelaksanaan pemeliharaan kesehatan PNS, penerima pensiun ; serta anggota keluarganya.
- b. Hak- hak peserta adalah :
1. Pengobatan / Perawatan / Imunisasi
 - a. Oleh dokter / Dokter gigi , baik pemerintah maupun swasta ;

- b. Oleh Balai Pengobatan atau Rumah Sakit, baik pemerintah maupun swasta ;
 2. Pertolongan / perawatan bersalin pada rumah bersalin atau oleh dokter / bidan, baik rumah sakit / dokter / bidan , baik pemerintah maupun swasta ;
 3. Obat-obat dari apotik pemerintahan mempunyai khasiat memulihkan kesehatan menurut resep dokter.
 4. Alat-alat perawatan yang mempunyai khasiat memulihkan kesehatan menurut resep dokter.
 5. Pembelian kaca-mata yang sangat digunakan demi kesehatan menurut resep dokter mata.
- c. Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan peserta ditentukan sebagai berikut :
1. Untuk perawatan di rumah sakit atau rumah bersalin (baik pemerintah maupun swasta).
 - a. Dibayar penuh atas semua biaya perawatan / bersalin apabila di kelas tiga.
 - b. Di bayar 60 % (enam puluh) persen apabila di kelas dua.
 - c. Di bayar 40 % (empat puluh) persen apabila di kelas satu
 2. Untuk pengobatan / pertolongan pada dokter (termasuk spesialis dan dokter gigi), bidan dan balai pengobatan dibayar penuh semua pengeluaran.
 3. Untuk harga obat-obat dan alat-alat perawatan yang diberikan oleh Apotik atas resep dokter dibayar penuh.
 4. Untuk pembelian kaca mata dibayar penuh untuk biaya pembelian kacanya (tidak termasuk ongkos maupun harga gagang kaca mata)
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pemeliharaan kesehatan peserta sebagai tersebut diatas tergantung dari iuran yang dikumpulkan dari setiap anggota.

F. Keadaan Pendapatan Responden

Pendapatan pegawai DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur ini, sebagaimana PNS lainnya pada umumnya sama di setiap Departemen sebab memang telah ditetapkan oleh Pemerintah, pendapatan tersebut tentunya dikeluarkan kembali baik untuk konsumsi, tabungan, maupun untuk berbagai keperluan lainnya.

Dari hasil Questioner yang sudah diolah, maka jumlah pendapatan pegawai DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur yang telah terpilih sebagai responden dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 : Pendapatan Responden Pegawai DIKNAS Tingkat I Kal-Tim Untuk Golongan I

| No. Responden | Jumlah Pendapatan / Bulan | | |
|---------------|---------------------------|---------|--------------|
| | Sebagai PNS | Lainnya | Jumlah Total |
| 1 | 564900 | 150000 | 714900 |
| 2 | 579000 | | 579000 |
| 3 | 614900 | 105000 | 719900 |
| 4 | 630300 | | 630300 |
| 5 | 686100 | 100000 | 786100 |
| 6 | 703200 | 100000 | 803200 |
| | | Jumlah | 4233400 |

Rp 4.233.400,- : 6 = Rp 705.566,67

Sumber data : Hasil Questioner, Tahun 2001

Dari tabel tersebut terlihat selain sebagai PNS 4 orang responden memperoleh pendapatan lainnya yang berasal dari usaha dagang, dan jasa.

Kemudian untuk golongan II, ada 8 orang responden, jumlah pendapatan dalam setiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 : Pendapatan responden pegawai DIKNAS Tingkat I Kal-Tim Golongan II

| No. Responden | Jumlah Pendapatan / Bulan | | |
|------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | Sebagai PNS | Lainnya | Jumlah Total |
| 7 | 628400 | 75000 | 703400 |
| 8 | 644100 | 50000 | 694100 |
| 9 | 684000 | 75000 | 759000 |
| 10 | 701100 | - | 701100 |
| 11 | 744600 | - | 744600 |
| 12 | 763200 | 60000 | 823200 |
| 13 | 830800 | 75000 | 905800 |
| 14 | 851600 | 100000 | 951600 |
| | | Jumlah | 6282800 |

Rp 6.282.800,- : 8 = Rp 785.350,-

Sumber data : Hasil Quesioner , Tahun 2001

Seperti pada golongan I , pendapatan yang diperoleh selain sebagai PNS juga ada pendapatan lainnya yang berasal dari usaha dagang, usaha penyewaan kendaraan roda 2 (dua) atau ojek, dan usaha konveksi.

Sedangkan untuk golongan III, jumlah pendapatan yang diperoleh juga bervariasi terutama pada pendapatan lainnya diluar pendapatan sebagai PNS, dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 6 : Pendapatan responden pegawai DIKNAS Tingkat I Kal-Tim
Golongan III

| No. Responden | Jumlah Pendapatan / Bulan | | |
|------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | Sebagai PNS | Lainnya | Jumlah Total |
| 15 | 628400 | 84750 | 713150 |
| 16 | 644100 | 100000 | 716600 |
| 17 | 684000 | 100000 | 891200 |
| 18 | 701100 | - | 701100 |
| 19 | 744600 | - | 744600 |
| 20 | 763200 | 85000 | 848200 |
| 21 | 830800 | - | 830800 |
| 22 | 851600 | - | 851600 |
| | | Jumlah | 6297250 |

Rp 6.297.250,- : 8 = Rp 787.156,25

Sumber data : Hasil Quesioner , Tahun 2001

Pegawai DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur ini , hanya ada 4 responden dari adanya proyek-proyek insidenti kantor juga ada diantaranya yang memiliki usaha industri rumah tangga yaitu pembuatan manik-manik untuk souvenir.

adapun untuk golongan IV jumlah pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7 : Pendapatan responden pegawai DIKNAS Tingkat I Kal-Tim
Golongan IV

| No. Responden | Jumlah Pendapatan / Bulan | | |
|---------------|---------------------------|---------|--------------|
| | Sebagai PNS | Lainnya | Jumlah Total |
| 23 | 1179200 | 100000 | 1279200 |
| 24 | 1252300 | 250000 | 1502300 |
| 25 | 1283600 | 300000 | 1583600 |
| 26 | 1315700 | 435000 | 1715700 |
| | | Jumlah | 6080800 |

Rp 6.080.800,- : 4 = Rp 1.520.200 ,-

Sumber data : Hasil Quesioner , Tahun 2001

Untuk golongan IV tersebut responden yang sudah mendapatkan pendapatan hanya 2 (dua) orang yaitu berasal dari proyek – proyek rutin diluar struktur gaji formal sebagai PNS.

G. Keadaan Pengeluaran dan Tabungan Responden

Pengeluaran yang dilakukan responden lainnya dipergunakan untuk konsumsi pangan dan non pangan, selebihnya dipergunakan untuk tabungan, besar-kecilnya pengeluaran tersebut hanya bervariasi bagi setiap responden sebab pendapatannya juga berbeda.

Adapun keadaan pengeluaran responden tersebut, bagi masing-masing kelompok golongan kepegawaian, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 8 : Pengeluaran responden pegawai DIKNAS Tingkat I Kal-Tim
Golongan I

| Nomor Responden | Jumlah Tanggungan Keluarga | Jumlah Pengeluaran / Bulan | | | Jumlah Total |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------|--------------|
| | | Pangan | Non Pangan | Tabungan | |
| 1 | 5 | 200000 | 85000 | - | 285000 |
| 2 | 3 | 105000 | 75000 | - | 180000 |
| 3 | 6 | 300000 | 150000 | 150000 | 450000 |
| 4 | 3 | 250000 | 100000 | - | 350000 |
| 5 | 4 | 300000 | 125000 | - | 425000 |
| 6 | 4 | 225000 | 105000 | 75000 | 405000 |
| | | 1380000 | 640000 | 225000 | 2095000 |

Rp 2.095.000,- ; 6 = Rp 349.166,67

Sumber Data : Hasil Questioner , tahun 2001

Tabel di atas tersebut menunjukkan ternyata pengeluaran yang sudah dilakukan oleh responden telah mengikuti pola pendapatan yang dilakukan oleh responden telah mengikuti pola pendapatan yang didapat oleh responden.

Dalam hal ini masih menunjukkan bahwa pendapatan masih lebih besar dari pengeluaran , namun demikian 4 (empat) orang responden berada dalam keadaan disaving, dan hanya 2 (dua) orang responden yang mampu saving.

Sedangkan pengeluaran untuk golongan II dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 9 : Pengeluaran responden pegawai DIKNAS Tingkat I Kal-Tim
Golongan II

| Nomor Responden | Jumlah Tanggungan Keluarga | Jumlah Pengeluaran / Bulan | | | Jumlah Total |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------|--------------|
| | | Pangan | Non Pangan | Tabungan | |
| 7 | 2 | 175000 | 125000 | - | 200000 |
| 8 | 2 | 150000 | 100500 | - | 250500 |
| 9 | 3 | 165000 | 50000 | 100000 | 270000 |
| 10 | 4 | 100000 | 100000 | - | 200000 |
| 11 | 4 | 85000 | 150000 | - | 235000 |
| 12 | 6 | 225000 | 75000 | 75000 | 375000 |
| 13 | 6 | 235500 | 100000 | - | 335500 |
| 14 | 6 | 350500 | 125000 | 185000 | 660500 |
| | | 1986000 | 925000 | 365000 | 2526500 |

Rp 2.526.500,- ; 8 = Rp 315.812,50

Sumber Data : Hasil Quesioner , tahun 2001

Tabel tersebut menunjukkan 3 orang responden masih dapat menabung dengan variasi tabungan berkisar antara Rp 50.000,- samapai dengan Rp 150.000,- selebihnya habis untuk konsumsi pangan dan non pangan.

Adapun pengeluaran responden untuk golongan III adalah sebagai berikut :

Tabel 10 : Pengeluaran responden pegawai DIKNAS Tingkat I Kal-Tim
Golongan III

| Nomor Responden | Jumlah Tanggungan Keluarga | Jumlah Pengeluaran / Bulan | | | Jumlah Total |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------|--------------|
| | | Pangan | Non Pangan | Tabungan | |
| 15 | 4 | 200000 | 150000 | 150000 | 500000 |
| 16 | 5 | 150000 | 85000 | 175000 | 410000 |
| 17 | 4 | 200000 | 175000 | - | 375000 |
| 18 | 5 | 250000 | 100000 | - | 350000 |
| 19 | 7 | 200000 | 50000 | 100000 | 350000 |
| 20 | 6 | 250000 | 75000 | - | 325000 |
| 21 | 5 | 175500 | 85000 | 175000 | 435500 |
| 22 | 5 | 250500 | 100000 | 100000 | 450500 |
| | | 1567050 | 695300 | 650000 | 3196000 |

Rp 3.196.000,- : 8 = Rp 399.500,-

Sumber Data : Hasil Quesioner , tahun 2001

Mayoritas dari tabel tersebut , untuk golongan III sudah dapat menabung, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan responden golongan III lebih baik daripada responden golongan I dan II.

Untuk pengeluaran responden untuk golongan IV adalah sebagai berikut :

Tabel 11 : Pengeluaran responden pegawai DIKNAS Tingkat I Kal-Tim
Golongan III

| Nomor Responden | Jumlah Tanggungan Keluarga | Jumlah Pengeluaran / Bulan | | | Jumlah Total |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------|--------------|
| | | Pangan | Non Pangan | Tabungan | |
| 23 | 3 | 215500 | 140000 | 150000 | 505500 |
| 24 | 4 | 250000 | 200500 | 200000 | 650500 |
| 25 | 5 | 200000 | 200000 | 350000 | 750000 |
| 26 | 8 | 300000 | 150000 | 155000 | 605000 |
| | | 965500 | 690500 | 855000 | 2511000 |

Rp 2.511.000 ; 4 = Rp 627.750,-

Sumber Data : Hasil Quesioner , tahun 2001

Dari ke empat orang responden golongan IV tersebut selain daripada sudah terpenuhinya kebutuhan pangan dan non pangan juga semua yang sudah dapat menabung dengan jumlah yang cukup besar yaitu bervariasi dari Rp 150.000,00 sampai dengan Rp 350.000,00 per bulan.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis dan Pembahasan

Sesuai dengan hasil penelitian , untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan, maka data-data yang terdapat pada hasil penelitian selanjutnya dianalisis dan dibahas.

Secara teoritis telah dijelaskan bahwa hasrat konsumsi atau konsumsi rata-rata yang tinggi dapat menurunkan tingkat atau hasrat untuk menabung, sehingga keadaan ini berpengaruh terhadap investasi yang juga akan menjadi berkurang karena kurangnya akumulasi saving masyarakat, kurangnya investasi akan dapat menimbulkan atau menghambat produksi yang ada pada masyarakat.

Dari data primer yang telah dikemukakan, maka dapat diperoleh rata-rata responden bagi setiap golongan kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 12 : Rata-rata pendapatan responden setiap golongan kepegawaian

| No | Golongan Kepegawaian Responden | Rata-rata Pendapatan Per bulan |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | I | Rp 705567,00 |
| 2 | II | Rp 706217,05 |
| 3 | II | Rp 787156,25 |
| 4 | IV | Rp 1520200,00 |

Sedangkan untuk melihat rata-rata pengeluaran responden baik berupa pengeluaran pangan, non pangan maupun tabungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13 : Rata-rata pengeluaran responden setiap golongan kepegawaian

| No | Golongan Kepegawaian Responden | Rata-rata Pengeluaran Per bulan |
|----|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | I | Rp 349166,67 |
| 2 | II | Rp 315812,50 |
| 3 | II | Rp 399500,00 |
| 4 | IV | Rp 627750,00 |

Apabila dibandingkan tabel rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran tersebut bahwa rata-rata pendapatan masih lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran, hal ini memungkinkan masih adanya kemampuan dari responden untuk memungkinkan masih adanya kemampuan dari responden untuk rasional dalam pola konsumsinya, namun apabila dibandingkan dari [eluaran tersebut, porsi untuk pengeluaran pangan , non pangan dari tabunngan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 14 : Porsi pengeluaran Pangan, Non pangan dan tabungan dari ke Seluruhan pengeluaran responden setiap golongan kepegawaian

| No | Golongan kepegawaian | Porsi Pengeluaran (%) | | |
|----|----------------------|-------------------------|------------|----------|
| | | Pangan | Non Pangan | Tabungan |
| 1 | I | 64,26 % | 28,17 % | 7,56 % |
| 2 | II | 57,83 % | 29,55 % | 12,60 % |
| 3 | III | 53,80 % | 23,87 % | 22,31 % |
| 4 | IV | 38,45 % | 27,50 % | 34,05 % |

Dari tabel terlihat porsi pengeluaran untuk pangan, non pangan maupun tabungan , untuk masing-masing golongan responden kepegawaian berbeda, dimana semakin tinggi golongan kepegawaian kebutuhan akan pangan dan non pangan lebih rendah bila dibandingkan dengan porsi tabungan yang semakin tinggi, apabila golongan kepegawaian lebih tinggi .

Sedangkan untuk melihat hasrat konsumsi rata-rata (MPC) pegawai Depdikbud Tingkat I Kalimantan Timur setiap golongan, yaitu dengan menganalisa rumus APC.

Yang dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 15 : Hasrat Konsumsi Rata-rata Pegawai DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur pada setiap golongan

| No | Golongan Kepegawaian | M P C | % |
|----|----------------------|--------|---------|
| 1 | I | 0,9362 | 93,62 % |
| 2 | II | 0,9052 | 90,52 % |
| 3 | III | 0,7527 | 75,27 % |
| 4 | IV | 0,8211 | 82,11 % |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hasrat konsumsi rata-rata bagi masing-masing golongan berbeda, dimana untuk golongan I dan II telah mendekati 1 (satu) yaitu 93,62 % dan 90,52 % sedangkan untuk golongan III dan IV lebih kecil dari pada golongan I dan II yaitu 75,27 % dan 82,11 %

Dengan demikian tabel tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan pegawai golongan I dan II habis untuk dikonsumsi, sedangkan untuk golongan III dan IV masih bisa untuk menabung, hal tersebut dapat terlihat pada tabel hasrat tabungan sebagai berikut :

Tabel 16 : Hasrat Tabungan Rata-rata (MPS) Pegawai DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur pada setiap golongan

| No | Golongan Kepegawaian | M P C | % |
|----|----------------------|--------|---------|
| 1 | I | 0,0638 | 06,38 % |
| 2 | II | 0,0948 | 09,48 % |
| 3 | III | 0,2473 | 24,73 % |
| 4 | IV | 0,1789 | 17,89 % |

Sedangkan untuk melihat hasrat konsumsi rata-rata (MPC) pegawai Depdikbud Tingkat I Kalimantan Timur setiap golongan, yaitu dengan menganalisa rumus MPC.

Yang dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 15 : Hasrat Konsumsi Rata-rata Pegawai DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur pada setiap golongan

| No | Golongan Kepegawaian | M P C | % |
|----|-------------------------|--------|---------|
| 1 | I | 0,9362 | 93,62 % |
| 2 | II | 0,9052 | 90,52 % |
| 3 | III | 0,7527 | 75,27 % |
| 4 | IV | 0,8211 | 82,11 % |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hasrat konsumsi rata-rata bagi masing-masing golongan berbeda, dimana untuk golongan I dan II telah mendekati 1 (satu) yaitu 93,62 % dan 90,52 % sedangkan untuk golongan III dan IV lebih kecil dari pada golongan I dan II yaitu 75,27 % dan 82,11 %

Dengan demikian tabel tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan pegawai golongan I dan II habis untuk dikonsumsi, sedangkan untuk golongan III dan IV masih bisa untuk menabung, hal tersebut dapat terlihat pada tabel hasrat tabungan sebagai berikut :

Tabel 16 : Hasrat Tabungan Rata-rata (MPS) Pegawai DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur pada setiap golongan

| No | Golongan Kepegawaian | M P S | % |
|----|-------------------------|--------|---------|
| 1 | I | 0,0638 | 06,38 % |
| 2 | II | 0,0948 | 09,48 % |
| 3 | III | 0,2473 | 24,73 % |
| 4 | IV | 0,1789 | 17,89 % |

Pada tabel tersebut terlihat kemampuan untuk menabung untuk golongan III dan IV masih lebih baik yaitu sebesar 24,73 % dan 17,89 % bila dibandingkan dengan golongan I dan II , hal ini dapat terjadi mengingat tingkat penghasilan rata-rata golongan III dan IV masih lebih besar dari pada konsumsi rata-ratanya.

Tabel MPC dan MPS tersebut dapat di rangkum sehingga $MPC + MPS = 1$, seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikkut

Tabel 17 : MPC dan MPS masing-masing golongan kepegawaian

| No | Golongan Kepegawaian | M P C | M P S |
|----|-------------------------|--------|--------|
| 1 | I | 0,9362 | 0,0638 |
| 2 | II | 0,9052 | 0,0948 |
| 3 | III | 0,7527 | 0,2473 |
| 4 | IV | 0,8211 | 0,1789 |

Dengan demikian maka hipotesis yang telah dikemukakan terbukti kebenarannya yaitu MPC golongan I dan II mendekati 1 (satu) , sedangkan golongan III dan IV lebih kecil dari golongan I dan II.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Jumlah pendapatan pegawai DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur untuk golongan I rata-ratanya sebesar Rp 630.300,00. Golongan II Rp 759.000 ,00 , golongan III Rp 848.200,00 , dan golongan IV Rp 1.502.300,00
- (2) Jumlah konsumsi atau pengeluaran pegawai DIKNAS Tingkat I Kalimantan Timur, untuk golongan I rata-ratanya sebesar Rp 242.500,00 , golongan II Rp 297.362,50 , golongan III Rp 364.043,75 dan golongan IV Rp 627.625,00
- (3) Porsi pengeluaran pegawai untuk golongan I dan II telah mendominasi hampir seluruh pendapatan yang didapat sedang, untuk golongan III dan IV porsinya lebih kecil.
- (4) Hasrat konsumsi dan tabungan rata-rata untuk golongan I adalah sebesar 93,62 % dan 06,38 % , untuk golongan II sebesar 90,52 % dan 09,40 % , untuk golongan III sebesar 75,27 % dan 24,73 % serta golongan IV sebesar 62,11 % dan 17,89 %

B. Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan sebagai berikut :

- (1) Perlu adanya peningkatan pendapatan untuk pegawai golongan I dan II melalui usaha-usaha tertentu yang produktif, yang tidak bertentangan dengan tugas-tugas kepegawaiannya.
- (2) Jumlah anggota keluarga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai untuk seluruh golongan, oleh sebab itulah program keluarga berencana (KB) bagi Pegawai Negeri Sipil sangat mutlak untuk diikuti
- (3) Kebiasaan menabung (Saving Habits) perlu terus dibina untuk seluruh golongan kepegawaian, walaupun dimulai dengan jumlah yang kecil namun diupayakan untuk bersifat terus-menerus.
- (4) Koperasi Pegawai Negeri Sipil adalah suatu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat membantu kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil , terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan bahn pokok, untuk itu terutama pegawai golongan I dan II sebaiknya menjadi anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ace Partadirejo, 1977, Perhitungan Pendapatan Nasional , LP3ES, Jakarta. 1990.
2. Andriessen, 1969, Proses Ekonomi , CV. Tarsito , Bandung.
3. Anonim, 1972, Hasil Perkiraan Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa , BKPMMD, Jakarta. 1981
4. Ari Sudarman dan Algifari, 1992, Ekonomi Mikro Makro , BPFE, Yogyakarta.
5. Eugene A. Diulio, 1977, Micro Ekonomi Theory , Fekon UGM, Yogyakarta
6. Gadner Akcley, 1979, Teori Ekonomi Makro , UI, Jakarta
7. Kadariah, 1981, Analisa Pendapatan Nasional , Bina Aksara , Jakarta.
8. Kaslan A. Thohir, 1962, Ekonomi Selayang Pandang , Sumur , Jakarta.
9. Komaruddin , 1980, Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Alumni , Bandung.
10. Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, ed, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok , 1982. YIIS dan CV. Rajawali
11. N.Sutjono , 1973, Kamus Production and Marketing Management , Akademi Sekretaris , Malang
12. Paul Samuekson, 1977, Economic Pengantar Uraian I , Viva Study Club, Jakarta.
13. R. Djoerban Wachid, 1976, Pelajaran Ekonomi , PT. Hien Hoo Sing, Yogyakarta.
14. R.J. Kaptin Adi Sumarta , Prisma No. 6 Tahun VI , LP3ES.
15. Sadono Sukirno, 1981 , Pengantar Teori Ekonomi Makro , Bina Grafika,
16. Sigit Purnomo, dkk, Ekonomi Umum II , Depdikbud RI Jakarta.

17. Samuelson dan William D. Nodhous, 1996, Economic, Erlangga.
18. Sudiyono R. , 1989, Ekonomi Makro Pengantar Analisa Pendapatan Nasional , Liberty, Yogyakarta.
19. Sumitro Djoyohadikusuma, 1985, Ekonomi Pembangunan ,PT. Pembangunan, Jakarta.
20. Syamsi Polan, 1996, Buletin Ekonomi, Bapindo Edisi Maret / April.
21. Winardi, 1977, kamus Ekonomi (Indonesia – Inggris) , Alumni , Bandung.
22. Winardi , 1989. Pengantar Ilmu Ekonomi , Tarsito , Bandung